

Analisis Konflik Antara Kelompok Masyarakat Di Maluku Tengah (Studikasuk Di Negeri Porto Dan Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah)

Analysis of Conflict Among Community Groups in Central Maluku (Case Study in Porto Village and Haria Village, Saparua Subdistrict, Central Maluku Regency)

Popy Latule¹, W. S. Pinoa², dan Susan E. Manakane³

¹Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan IPS FKIP Universitas Pattimura

Sepnath@gmail.com

Abstrak

Konflik merupakan bentuk perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan otoritas. Tujuan dari pihak yang terlibat dalam konflik tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingan mereka. Dampak konflik seringkali bersifat destruktif, terutama dalam bentuk kekerasan seperti perang, yang menyebabkan kerusakan dan kerugian materi dan non-materi. Konflik dianggap traumatik dan mengganggu stabilitas serta keseimbangan yang diidamkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konflik antara kelompok masyarakat di Maluku Tengah, dengan fokus pada Negeri Porto dan Negeri Haria di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Pendekatan kualitatif digunakan dengan menganalisis data studi kasus melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari pemerintah Negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh batas-batas tanah yang belum terselesaikan, konflik antar pemuda dan pelajar yang dapat meluas menjadi konflik identitas Negeri, dan konflik kepentingan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperpanjang konflik demi kepentingan identitas.

Kata kunci: Konflik, Kelompok, Masyarakat, Maluku Tengah

Abstract

Conflict is a form of struggle to obtain scarce elements such as values, status, power, and authority. The objectives of those involved in conflict are not only to gain advantages but also to subdue their rivals. The impact of conflict is often destructive, especially in the form of violence such as war, leading to material and non-material damage and loss. Conflict is considered traumatic and disrupts the desired stability and balance. This research aims to understand the conflict among community groups in Central Maluku, focusing on Negeri Porto and Negeri Haria in the Saparua sub-district, Central Maluku Regency. A qualitative approach is employed, analyzing case study data through in-depth interviews with key informants from the village government, religious figures, community leaders, women, and youth figures. The conclusion of this research indicates that the conflict is caused by unresolved land boundaries, conflicts among youth and students that can escalate into identity conflicts for the village, and conflicts of interest carried out by specific parties to prolong the conflict for identity interests.

Keywords: Conflict, Groups, Community, Central Maluku

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara majemuk, memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Perbedaan pandangan dan tujuan sering dianggap sebagai tantangan yang hanya

dapat diatasi jika semua pihak memiliki tujuan yang sama atau jika satu pandangan lebih dominan daripada yang lain. Oleh karena itu, perbedaan ini kerap menimbulkan konflik sosial karena berbagai kepentingan masyarakat berupaya untuk tetap bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, setiap masyarakat di dunia ini pasti akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah suatu proses yang berkelanjutan, menunjukkan bahwa setiap komunitas, pada hakikatnya, akan mengalami transformasi secara terus-menerus.

Realitas menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat tidak selalu seragam di semua lapisan. Terkadang, beberapa masyarakat mengalami transformasi lebih cepat dibandingkan yang lain. Perubahan tersebut dapat mencakup nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku organisasi, struktur lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, distribusi kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan sebagainya. Pendidikan menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi pemahaman manusia terhadap perubahan. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seseorang cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih mampu memilih arah perubahan yang positif.

Perubahan sosial yang melibatkan seluruh komponen masyarakat cenderung hanya dapat terwujud melalui konflik. Pernyataan ini, seperti dikemukakan oleh Sumartono (2019), mengindikasikan bahwa transformasi sosial yang menyeluruh memerlukan adanya gesekan atau pertentangan dalam masyarakat. Konflik dianggap sebagai unsur yang mendasar dan tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Di setiap sudut dunia, manusia berpotensi menghadapi konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan. Seiring perkembangan peradaban manusia, konflik telah menjadi warna khas dalam kehidupan sosial yang tak dapat dihapuskan. Meskipun sering dianggap negatif, namun konflik dapat menjadi pemicu perubahan dan mendorong masyarakat untuk mencari solusi serta meraih perkembangan yang lebih baik.

Penanganan konflik menjadi kunci penting dalam mencapai keberhasilan organisasi, dan peran pemimpin dalam proses ini sangat menentukan. Konflik yang dikelola dan dikendalikan dengan baik oleh pemimpin mampu membawa dampak positif bagi kesatuan organisasi. Sebaliknya, jika konflik tidak ditangani dengan cermat dan mengalami eskalasi terbuka, konsekuensinya dapat merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat perkembangan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah atau para pemimpin dalam masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam mengelola konflik secara efektif. Langkah-langkah yang diambil dalam mengelola konflik harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial dan kepentingan masyarakat. Pemimpin yang mampu mengelola konflik dengan bijaksana dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdamaian, mencegah eskalasi konflik yang merugikan, dan memastikan bahwa tujuan organisasi atau masyarakat dapat tercapai tanpa hambatan yang dapat menimbulkan potensi konflik. Oleh karena itu, kemampuan mengelola konflik merupakan salah satu aspek kritis yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer untuk mencapai kesuksesan dan stabilitas dalam organisasi.

Di Kabupaten Maluku Tengah, konflik antar kelompok menjadi fenomena umum, dan contoh yang mencolok terjadi antara dua negeri yang berdekatan, yaitu Porto dan Haria. Konflik ini terwujud

sebagai dampak dari sengketa mata air yang dikenal sebagai Air Raja, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak M. Latuihamallo dari Porto dan Bapak J. Latuperissa. Kedua negeri ini berpendapat bahwa mata air tersebut merupakan milik masing-masing pihak, menyebabkan ketegangan yang berujung pada konflik. Melalui identifikasi akar permasalahan seperti ini, dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik antar kelompok di daerah tersebut. Oleh karena itu, penanganan konflik di Kabupaten Maluku Tengah memerlukan pendekatan yang berdasarkan pada pemahaman konteks lokal dan kepentingan yang saling bertentangan agar solusi yang berkelanjutan dapat ditemukan.

Konflik yang berlarut-larut dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi pihak yang terlibat. Sebagai perbandingan, konflik di dua negeri terdekat, Porto dan Haria, menciptakan dinamika yang kompleks karena keduanya memiliki kepentingan yang saling bertentangan terkait sumber mata air. Keadaan konflik ini telah menyebabkan kerugian besar, termasuk korban jiwa, kerusakan pada rumah warga dan tempat ibadah, serta retaknya hubungan sosial di antara masyarakat Porto dan Haria yang pada dasarnya memiliki hubungan keluarga. Dampak konflik yang melibatkan dua komunitas ini menciptakan ketegangan dan kebencian, merusak kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, menyelesaikan konflik tersebut memerlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat secara keseluruhan di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Pendekatan perdamaian yang holistik dan inklusif perlu diterapkan untuk mengembalikan harmoni dan membangun kembali kerja sama di antara kedua negeri tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang memfokuskan analisis pada kasus-kasus tertentu di Negeri Porto dan Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Studi kasus memungkinkan spesifikasi yang mendalam terhadap kasus-kasus dalam konteks tertentu, seperti individu, kelompok budaya, atau potret kehidupan. Lokasi penelitian di dua negeri ini memungkinkan penyelidikan mendalam terhadap konflik antar kelompok masyarakat di Maluku Tengah. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu mulai 11 September hingga 11 Oktober 2023. Variabel yang diteliti mencakup berbagai aspek konflik, seperti kronologi konflik, faktor penyebab konflik, bentuk konflik, dan resolusi konflik, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan dinamika konflik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Negeri Haria

a. Batas Wilayah

Secara geografis, Negeri Haria terletak pada koordinat 3029'17" - 3037'39" LS dan 128032'43" - 128043'49" BT. Dengan luas mencapai 1.900 hektar, negeri ini dihuni oleh 6.607 jiwa yang terdiri dari

1.400 kepala keluarga. Keberadaan Negeri Haria sangat strategis karena berfungsi sebagai kota pelabuhan yang menjadi titik penghubung antar pulau, dilengkapi dengan sarana penyeberangan, dan menjelma sebagai jalur perdagangan vital antara Pulau Saparua dan pulau-pulau lain di Maluku. Negeri Haria memiliki batas wilayah yang membentang sepanjang arah mata angin, dengan Jalan Raya di sebelah Utara, Negeri Booi di sebelah Selatan, Negeri Tiouw dan Paperu di sebelah Timur, serta kembali bertemu dengan Negeri Booi di sebelah Barat.

b. Iklim

Keadaan iklim di Negeri Haria serupa dengan umumnya di daerah Maluku, yakni memiliki iklim tropis. Negeri Haria, seperti daerah Maluku lainnya, mengalami pengaruh dua musim utama, yaitu musim barat atau utara yang berlangsung dari bulan Desember hingga Maret, dan musim timur atau tenggara yang berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober. Kedua musim ini bergantian, dipisahkan oleh musim transisi pada bulan April (peralihan dari musim barat ke musim timur) dan bulan November (peralihan dari musim timur ke barat). Keadaan iklim tropis ini turut membentuk pola cuaca yang mencirikan daerah ini, memengaruhi aktivitas sehari-hari penduduk dan pola pertanian di Negeri Haria.

c. Data Penduduk

Klasifikasi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Hingga tahun 2023, Negeri Haria diperkirakan memiliki jumlah penduduk sekitar 1.557 kepala keluarga, dengan total jiwa mencapai 6.728 jiwa. Dalam rinciannya, terdapat 3.409 jiwa laki-laki dan 3.319 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk Negeri Haria, yang tersebar di seluruh wilayahnya, menganut agama Kristen Protestan. Data jumlah penduduk ini menjadi indikator penting dalam menganalisis dinamika demografis, sosial, dan keagamaan di Negeri Haria, memperlihatkan komposisi masyarakat yang beragam dan membantu perencanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di tingkat lokal.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Usia (Thn)	L	P	F
0 – 4	267	264	531
5 – 9	381	281	662
12 – 14	304	428	732
15 – 19	394	500	894
20 – 24	202	350	552
25 – 29	306	320	626
30 – 34	350	200	550
35 – 39	300	294	594
40 – 44	150	250	400
45 – 49	250	105	355
50 – 59	245	125	370
60 –64	170	105	275

≥ 65	90	97	187
JUMLAH	3.409	3.319	6.728

Sumber: Pemerintah Negeri Haria 2023

Data tabel 1. menunjukkan bahwa pada tahun 2023 penduduk Negeri Haria terdiri dari 3.409 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 3.319 penduduk perempuan. Berdasarkan data tersebut maka dapat dihitung sex ratio penduduk Negeri Haria dengan rumus:

$$SR = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100$$

$$SR = \frac{3.409}{3.319} \times 100$$

$$SR = 102$$

Dari data perhitungan *sex ratio* maka dapat diperoleh SR sebesar 102. Dari penghitungan di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kelahiran laki-laki sebesar 102 jiwa. Dikarenakan angka kelahiran laki-laki lebih tinggi, dari tingkat migrasi dan kematian perempuan yang rendah.

Berikut dijelaskan DR dari Negeri Haria. Berdasarkan data umur penduduk di Negeri Paperu maka dapat di digolongkan ke dalam 3 kelompok antara lain:

- Kelompok umur belum produktif (0 – 14 tahun) sebanyak 1.925 jiwa
- Kelompok umur produktif (15 – 64 tahun) 4.611 sebanyak jiwa
- Kelompok umur non produktif (>65 tahun) sebanyak 187 jiwa

dihitung angka ketergantungan hidup (*dependency ratio*) dengan rumus:

$$DR = \frac{\text{Penduduk Belum Produktif} + \text{Penduduk Non Produktif}}{\text{Penduduk Produktif}} \times 100$$

$$DR = \frac{1.925+187}{4.611} \times 100$$

$$DR = 45,80 \text{ (di bulatkan ke atas 46)}$$

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa rata-rata beban menanggung (DR) sebesar 46, artinya seperti 100 orang penduduk Negeri Haria yang berusia produktif harus menanggung 46 orang penduduk yang belum produktif.

Mata Pencarian

Pekerjaan yang dijalankan oleh warga Negeri Haria sangat bervariasi, dan untuk informasi lebih detail dapat ditemukan pada daftar di bawah ini.

Tabel 2. Mata Pencarian

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	337
Nelayan	687
PNS	62
Guru	152
TNI / Polri	32
Swasta	50
Wirausaha	201
Pensiunan	56
Jumlah	1.577

Sumber Data: Pemerintah Negeri Haria

Perikanan, khususnya sebagai nelayan, telah menjadi sektor ekonomi yang mendominasi dalam kehidupan masyarakat ini. Dominasi ini terjadi karena potensi hasil kelautan yang sangat besar.

Banyak orang dalam masyarakat ini yang mengandalkan pekerjaan sebagai nelayan, mengingat kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Keberlanjutan sektor perikanan menjadi kunci penting dalam membentuk perekonomian masyarakat ini, dan keterlibatan banyak orang dalam profesi nelayan mencerminkan signifikansi sektor perikanan dalam menyokong mata pencaharian mereka.

2. Negeri Parto

a. Letak Geografis

Negeri Porto, secara geografis, merupakan salah satu dari 18 negeri yang terletak di bagian timur Pulau Saparua. Administratif, negeri ini berada di bawah naungan Kabupaten Maluku Tengah, yang memiliki ibu kota di Masohi di Pulau Seram. Terletak di Kecamatan Saparua, Negeri Porto memiliki pelabuhan speed boat yang memudahkan masyarakat Saparua menuju Ambon, menjadikannya sangat strategis karena berdekatan dengan pelabuhan besar di Haria.

Negeri Porto, dengan tanah ulayat atau tanah petuanan yang meliputi hampir seluruh jahirahnya, memiliki bagian utara-barat sekitar ± 42 atau lebih dari Pulau Saparua. Sebelah selatannya berbatasan dengan Negeri Haria, membentang dari barat ke timur sejauh 2 km dengan lebar dari utara ke selatan sekitar 0,5 km, menjadikan luas wilayah huniannya sekitar ± 1 . Letak geografisnya sangat strategis, terletak tepat pada mulut Teluk Haria, menjadi pintu keluar antara Tanjung Hatulani dan Waihokal menuju Ambon atau menyusuri Selat Saparua hingga tembus ke Tanjung Waiallo menuju Pulau Seram. Karena keunikannya, negeri ini dinamakan Poru, yang artinya menarik hati, dengan pelabuhannya yang bernama Namalesi, yang artinya Pelabuhan yang indah. Mayoritas penduduknya, sekitar 97%, menganut agama Kristen Protestan, sementara 3% sisanya beragama Kristen dari gereja lain. Adapun batas wilayah Negeri Porto adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Kulur dan Pia, sebelah selatan dengan Haria Kecamatan Saparua, sebelah barat dengan Desa Tiouw, dan sebelah timur berbatasan dengan laut.

b. Iklim

Di daerah Maluku Tengah, Negeri Porto mengalami pengaruh iklim tropis dengan kehadiran dua musim utama, yaitu musim timur atau musim hujan dan musim barat atau musim panas. Musim timur, yang meliputi bulan Mei hingga September, ditandai oleh curah hujan tinggi terutama pada bulan Juli hingga Agustus. Sementara itu, musim barat, berlangsung dari bulan Oktober hingga Maret, menandai periode musim panas dengan kondisi kering. Transisi antara kedua musim ini juga disertai oleh musim pancaroba, yaitu perubahan dari musim timur ke musim barat pada bulan Oktober dan November, serta dari musim barat ke musim timur pada bulan Maret dan April. Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika musim ini menjadi kunci penting bagi masyarakat Negeri Porto dalam mengelola aktivitas pertanian dan kehidupan sehari-hari mereka.

C. Kependudukan

Klasifikasi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Hingga tahun 2023, populasi Negeri Porto diperkirakan mencapai 650 jiwa yang tersebar dalam sekitar 2422 kepala keluarga. Dalam rinciannya, terdapat 1124 jiwa laki-laki (48%) dan 1298 jiwa perempuan (52%), menciptakan suatu distribusi gender yang relatif seimbang. Masyarakat Negeri Porto mayoritas mengidentifikasi diri sebagai penganut agama Kristen Protestan, dan keberagaman ini tercermin dalam sebaran geografis penduduk yang melibatkan seluruh wilayah negeri. Data demografis ini menjadi dasar penting bagi pemerintah setempat dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik, sementara pemahaman lebih lanjut tentang distribusi gender dan agama memberikan pandangan lebih mendalam untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan keragaman masyarakat.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Usia (Thn)	L	P	F
0 – 4	53	60	113
5 – 9	119	129	248
12 – 14	71	145	216
15 – 19	90	120	210
20 – 24	58	135	193
25 – 29	58	100	158
30 – 34	62	83	145
35 – 39	64	99	163
40 – 44	125	110	235
45 – 49	215	100	315
50 – 59	94	97	191
60 –64	65	66	131
≥ 65	50	54	104
JUMLAH	1.124	1.298	2.422

Berdasarkan data tabel 1 tahun 2023, penduduk Negeri Porto terbagi antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.124 jiwa dan perempuan sebanyak 1.298 jiwa. Dengan menggunakan rumus sex ratio (SR) yang menghitung perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, didapatkan SR sebesar 115. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap 100 perempuan, terdapat sekitar 115 laki-laki. Penyimpangan ini dapat diartikan bahwa tingkat kelahiran perempuan lebih tinggi, mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebijakan keluarga atau faktor budaya yang mendukung kelahiran anak perempuan. Selain itu, tingkat migrasi dan kematian perempuan yang rendah juga dapat mempengaruhi hasil ini.

Dalam konteks demografi Negeri Porto, penting untuk mengevaluasi ketergantungan hidup (dependency ratio/DR) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan menggolongkan penduduk ke dalam tiga kelompok usia, yaitu belum produktif (0–14 tahun), produktif (15–64 tahun), dan non-

produktif (>65 tahun), dihitunglah angka DR. Hasil perhitungan menunjukkan DR sebesar 39,11, yang dibulatkan menjadi 40. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk yang berusia produktif harus menanggung beban hidup 40 orang yang belum produktif dan non-produktif. Analisis ini memberikan gambaran tentang beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh populasi usia produktif, dan menjadi dasar bagi pemerintah Negeri Porto dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Kronologis Konflik

Porto dan Haria, dua Negeri yang terletak di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, memiliki keterkaitan geografis yang erat, meskipun tidak memiliki batas wilayah yang jelas di antara keduanya. Negeri Porto, dengan luas wilayah sebesar 30 km², dan Haria, di mana seluruh penduduknya merupakan anggota GPM, seringkali terlibat dalam konflik yang merugikan baik dari segi harta benda maupun korban jiwa. Sejarah konflik sosial antara keduanya dapat ditelusuri hingga tahun 1924, ketika pemuda-pemuda di Negeri tersebut terlibat dalam pertikaian akibat pengaruh minuman keras. Meskipun konflik ini berukuran kecil dan tidak mengakibatkan korban jiwa, hal ini menjadi cikal bakal dari ketegangan yang lebih besar di masa mendatang.

Konflik-konflik selanjutnya di tahun 1957, 1977, dan 2001 menggambarkan eskalasi masalah sosial yang berkaitan dengan pengaruh minuman keras, sengketa mata air (Air Raja), dan perlombaan perahu. Konflik pada tahun 1957 melibatkan pembakaran delapan rumah, konflik di tahun 1977 menyebabkan dua kematian akibat penggunaan senjata api, sementara konflik besar di tahun 2001 mengakibatkan 50 rumah terbakar dan tiga orang meninggal. Sengketa atas mata air Air Raja, yang diakui sebagai milik masing-masing desa, memperumit hubungan antara Porto dan Haria. Kejadian perlombaan perahu menjadi pemicu penting dalam konflik tersebut. Sebagai suatu tantangan, penyelesaian konflik ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan pemahaman bersama, membangun dialog yang konstruktif, dan merancang solusi berkelanjutan untuk membangun kedamaian dan kerjasama di antara keduanya.

Konflik yang berkepanjangan antara Negeri Porto dan Haria tidak hanya menciptakan kerugian materiil, tetapi juga melibatkan kerusakan hubungan sosial yang sangat dalam di antara kedua masyarakat yang seolah memiliki ikatan keluarga. Dampak konflik ini mencakup jatuhnya korban jiwa, kerusakan pada rumah warga, termasuk rumah ibadah, dan meruncingnya ketegangan sosial. Kehidupan sehari-hari masyarakat Porto dan Haria terasa penuh kepahitan akibat konflik berlarut-larut ini. Solusi atas konflik tersebut memerlukan kolaborasi semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, gereja, dan seluruh masyarakat, untuk menginisiasi usaha perdamaian yang menyeluruh.

Proses rekonsiliasi menjadi kunci penting dalam membangun kembali kepercayaan dan harmoni di antara Negeri Porto dan Haria. Rekonsiliasi bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi juga

melibatkan proses pembangunan kembali hubungan yang terputus. Dalam beberapa kasus, proses rekonsiliasi membutuhkan waktu yang lama, dan tidak bisa dipaksakan. Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus secara sukarela dan sungguh-sungguh berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi. Pengampunan dan rekonsiliasi adalah konsep yang saling terkait, di mana setiap langkah dalam proses tersebut memerlukan kepemimpinan dan tanggung jawab penuh dari semua individu yang terlibat. Upaya bersama ini menjadi fondasi bagi pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan di Negeri Porto dan Haria.

Media lokal dan nasional sering kali menyoroti upaya perdamaian antara Negeri Porto dan Haria, yang umumnya melibatkan inisiatif pemerintah daerah, seperti seminar-seminar perdamaian dan pembentukan tim perdamaian Tim 10. Namun, perlu diperhatikan bahwa gereja, khususnya Gereja Protestan Maluku (GPM) Jemaat Porto dan Haria, juga memiliki peran penting dalam upaya perdamaian yang berlangsung selama puluhan tahun ini. Dalam pandangan John Titaley, gereja di sini dianggap sebagai organisasi keagamaan yang "universal" dan memiliki makna dalam konteks sosial tertentu. GPM tidak hanya berfungsi sebagai pewarta firman di mimbar gereja, melainkan juga sebagai sarana perdamaian dalam konteks konflik sosial.

Gereja memainkan peran aktif dalam rekonsiliasi antara Porto dan Haria. Selain memberikan solusi untuk mencapai perdamaian abadi, GPM juga terlibat dalam memberikan bimbingan khusus terkait konflik komunal, melatih para pemimpin gereja dan anggota organisasi seperti perempuan dan laki-laki. GPM juga membangun jaringan dengan pemerintah, menyelenggarakan acara makan patita, Natal se-Klasis Lease di Porto-Haria, dan memperingati komitmen pada setiap tanggal 27 bersama pemerintah negeri, petugas keamanan, guru, dan majelis. Meskipun upaya yang dilakukan oleh GPM sangat terstruktur, konflik antara kedua negeri ini masih berlanjut. Keterlibatan gereja menjadi kunci untuk mencegah potensi meledaknya konflik sewaktu-waktu dan membantu membangun perdamaian yang kokoh dan berkelanjutan di antara masyarakat Porto dan Haria.

2. Faktor Penyebab Konflik

Konflik batas tanah antara Negeri Porto dan Haria memiliki akar yang dalam, mencakup sejarah nenek moyang dan perkawinan lintas negeri yang memunculkan kompleksitas hukum dan adat. Batas tanah ini ditentukan oleh "Air Raja," sebuah entitas yang menjadi batas antara Porto dan Haria. Sejak perkawinan antara warga Porto dan Haria dengan marga Loupatty, hak pakai tanah diberikan kepada pihak perempuan, tetapi tanah tersebut kemudian diwariskan oleh keturunan hasil perkawinan tersebut. Saat ini, tanah yang seharusnya menjadi milik bersama kedua negeri menjadi sumber konflik yang belum terpecahkan, mengakibatkan ketidakjelasan siapa yang sebenarnya menjadi pemilik tanah tersebut.

Sejarah konflik batas tanah ini melibatkan peristiwa-peristiwa seperti sumpah batas tanah yang diadakan oleh Belanda bagi Haria dan Porto, serta penggunaan bersama Mata Air Raja sebagai sumber air minum untuk Haria. Pada tahun 1950, konflik ini kembali mencuat akibat batas petuanan yang

menjadi sumber perselisihan antara kedua negeri, dan hingga kini belum dapat diselesaikan baik secara hukum maupun adat. Pernyataan dari sekretaris negeri Haria yang mencatat hambatan pembuatan sumur bor sebagai sumber mata air pada tahun 2015 juga menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini, menciptakan ketegangan di daerah perbatasan.

Pentingnya menyelesaikan konflik batas tanah ini tampak dari kesan bahwa tanah yang menjadi petuanan masing-masing negeri masih menjadi sumber potensi konflik di masa depan. Kejelasan dalam kepemilikan tanah dan batas petuanan dapat membantu meredakan ketegangan, mendorong kerjasama antar-negeri, dan mempromosikan kedamaian di wilayah tersebut. Dengan melibatkan hukum, adat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemimpin adat, upaya penyelesaian konflik ini menjadi semakin mendesak demi mencapai stabilitas dan harmoni antara Negeri Porto dan Haria.

Hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap Negeri Porto dan Haria mengungkapkan bahwa konflik antara keduanya dipicu oleh sejumlah faktor yang kompleks. Batas wilayah, perselisihan antara anak sekolah dengan teman sejawat, dan masalah seputar Air Raja merupakan beberapa elemen yang memainkan peran kunci dalam menciptakan ketegangan di antara kedua negeri ini. Menurut penjelasan Bapak A. Aponno dari Negeri Porto dan Bapak J. Latuperissa dari Negeri Haria, konflik tersebut memberikan dampak serius terhadap masyarakat setempat. Aspek ekonomi terpengaruh dengan munculnya kesulitan, sedangkan ketahanan keamanan terganggu, menciptakan rasa ketidaknyamanan di antara warga. Selain itu, keruntuhan pada aspek sosial-budaya tampaknya semakin terasa, dengan fondasi kekeluargaan yang runtuh dan aktivitas bisnis yang terbatas. Konflik ini juga meresahkan masyarakat hingga merasakan kesakitan yang mendalam. Dengan demikian, penyelesaian konflik antara Porto dan Haria bukan hanya penting untuk memulihkan hubungan antara keduanya, tetapi juga untuk mengembalikan stabilitas, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di kedua negeri tersebut. Faktor Manusia Timbul karena Ciri-ciri Individual:

a. Ketidakpedulian Terhadap Kesejahteraan Bersama

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa konflik antara Negeri Porto dan Haria dipicu oleh adanya ketidakpedulian terhadap kesejahteraan bersama. Individu yang bersifat egois cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi tanpa memperhitungkan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti ini dapat menciptakan ketidaksetaraan, merugikan kepentingan bersama, dan akhirnya memicu ketegangan di antara anggota masyarakat.

b. Perebutan Sumber Daya

Egoisme individu atau kelompok di Negeri Porto dan Haria mendorong perebutan sumber daya ekonomi dan sosial secara agresif. Kompetisi yang intens untuk mendapatkan keuntungan pribadi dapat memicu persaingan yang sengit dan berujung pada konflik. Perebutan sumber daya menjadi pemicu utama konflik ekonomi dan sosial antara kedua negeri.

c. Manipulasi dan Pengkhianatan

Egoisme dapat mengarah pada penggunaan manipulasi atau pengkhianatan oleh individu yang bertujuan mencapai keuntungan pribadi. Manipulasi dan pengkhianatan ini tidak hanya merusak kepercayaan di antara anggota masyarakat tetapi juga menjadi faktor yang memperkeruh suasana konflik. Adanya pihak ketiga yang terlibat dalam konflik Porto-Haria juga terungkap dalam hasil penelitian.

d. Ketidakmauan untuk Berkompromi

Individu atau kelompok masyarakat yang bersifat egois seringkali enggan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi karena terlalu terfokus pada kepentingan pribadi mereka. Sikap ketidakmauan untuk berkompromi menjadi penghambat dalam mencari solusi damai dan dapat memperpanjang atau memperdalam konflik antara Porto dan Haria. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti bahwa sulitnya kompromi menjadi salah satu pemicu konflik yang berlarut-larut di antara masyarakat kedua negeri tersebut.

3. Bentuk Konflik

Bentuk konflik antar Negeri Porto dan Haria sebagai berikut

a. Konflik Antar Pemuda sebagai Pemicu Konflik Antarnegeri

Konflik antar pemuda di Saparua, khususnya di Negeri Porto dan Haria, telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik antar kedua negeri tersebut. Sebuah kejadian pada tahun 2011, dimana perkelahian antar pemuda akibat miras di sebuah pesta pemuda di Porto, menciptakan kesalahpahaman yang merembet menjadi konflik antara Negeri Porto dan Haria. Tokoh masyarakat dan tokoh perempuan di Haria menyoroti bahwa kesalahpahaman antar pemuda dapat dengan cepat merembet menjadi konflik antarnegeri, memperlihatkan kerentanan terhadap perbedaan pandangan dan kepentingan di antara kelompok pemuda. Untuk mencegah konflik berkelanjutan, pemerintah daerah memutuskan untuk membangun sekolah-sekolah di negeri masing-masing, mengindahkan perlunya mengurangi potensi konflik di kalangan pemuda.

b. Konflik Kepentingan sebagai Pemicu Konflik Antarnegeri

Konflik antara Negeri Porto dan Haria seringkali dipicu oleh pertentangan kepentingan, terutama saat pelantikan raja. Pada tahun 1983 dan 2012, pelantikan raja di Porto menjadi momen sensitif yang menyulut konflik antar kedua negeri. Mantan sekretaris tokoh adat mengungkapkan bahwa beberapa pihak dengan sengaja menciptakan ketegangan dengan memanipulasi pemuda dari kedua negeri. Dalam contoh pada tahun 2012, konflik antar dua anak sekolah menjadi bahan bakar untuk konflik antarnegeri. Kejadian ini mengindikasikan adanya motif tertentu yang ingin memanfaatkan konflik demi kepentingan pribadi atau kelompok. Konflik tersebut bahkan dianggap memiliki otak-otak yang berusaha mengacaukan situasi dan memastikan kelanjutan konflik demi

mencapai tujuan mereka. Ini menunjukkan bahwa kepentingan personal tertentu dapat menjadi pemicu dan pemelihara konflik antarnegeri, menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut.

4. Resolusi Konflik di dalam Masyarakat

Upaya penanganan konflik dan rekonsiliasi di Negeri Porto dan Haria seringkali diwarnai oleh kendala dan hambatan, terutama pada tahun 2012 saat sekretaris Negeri Porto mencoba mengadakan pertemuan antar kedua negeri untuk membentuk tim perdamaian. Namun, upaya tersebut gagal karena masih ada pihak ketiga yang turut serta dalam situasi konflik, seperti diungkapkan oleh mantan sekretaris Negeri Haria, Y.M. Konflik terus berlanjut di kedua negeri ini, menuntut penanganan yang tepat dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah Negeri, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Menurut tokoh masyarakat Haria, J.L, penanganan konflik oleh aparat keamanan seringkali lambat dan tidak responsif terhadap isu-isu yang berkembang. Masyarakat merasa kaget, dan baru setelah konflik meletus, aparat turun untuk mengamankan situasi. Bahkan, pada tahun 2011-2013, ketika konflik berkepanjangan dengan korban jiwa, penanganan yang lambat dari Polisi Brimob dari Ambon memicu usulan langsung dari raja Porto kepada pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan penggantian pasukan Brimob dengan pasukan Tentara dari 731 Kabaresi pada tahun 2014. Setelah kehadiran Tentara dari Kabaresi, masyarakat merasakan perubahan signifikan dalam keamanan, di mana ketegangan antar kedua negeri mereda, dan mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih aman dan tenang.

Penanganan konflik yang efektif oleh aparat keamanan, khususnya melibatkan pasukan Tentara dari Kabaresi, membawa dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat di Negeri Porto dan Haria. Kesigapan dalam menanggapi situasi konflik serta pemahaman terhadap dinamika yang terjadi antara kedua negeri menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan rasa aman di daerah perbatasan. Seiring dengan kehadiran pasukan tersebut, masyarakat kini dapat menikmati kehidupan sehari-hari tanpa ketegangan seperti beberapa tahun sebelumnya. Ungkapan dari tokoh masyarakat Porto, M N, yang menyatakan bahwa anak-anak kini dapat sekolah tanpa rasa takut dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa khawatir, menggambarkan dampak positif dari penanganan konflik yang responsif dan efisien oleh pihak keamanan.

terus menjalankan kegiatan perdamaian yang telah dilakukan oleh masyarakat lokal, terutama melalui inisiatif yang dikenal sebagai "Tiga Batu Tungku." Pada periode konflik tahun 2011-2013, upaya pertemuan dan pembentukan tim perdamaian sempat mengalami kegagalan. Namun, pada 17 Oktober 2013, pemerintah Negeri Porto dan Haria membentuk tim perdamaian dengan anggota dari masing-masing negeri, yang terdiri dari unsur pemerintah, gereja, dan pendidikan. Meskipun tim ini awalnya diharapkan dapat berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik, namun kenyataannya, fungsinya tidak sesuai harapan. Pada tahun 2014, masyarakat mengambil langkah lebih lanjut dengan membentuk tim perdamaian alternatif yang dikenal sebagai "Tiga Batu Tungku." Tim ini terdiri dari unsur pemerintah, gereja, dan pendidikan, terutama melibatkan guru-guru. Mereka melaksanakan

ibadah bersama setiap tanggal 27 setiap bulan sebagai bentuk kegiatan perdamaian. Pilihan tanggal 27 dipilih karena berkaitan dengan peresmian tugu perdamaian di perbatasan kedua negeri. Meskipun partisipasi anggota tim mungkin sesekali terbatas, kegiatan Tiga Batu Tungku tetap berjalan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif lokal ini memberikan alternatif positif dalam menangani konflik, meskipun upaya-upaya formal sebelumnya tidak berhasil sepenuhnya. Upaya ini mencerminkan keinginan masyarakat lokal untuk menciptakan perdamaian dan menjaga hubungan yang harmonis antara Porto dan Haria.

C. Pembahasan

Konflik merupakan bagian intrinsik dari dinamika kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Di Negeri Porto dan Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, konflik antar negeri menjadi realitas yang sering kali menghantui kedamaian masyarakat. Konflik ini tidak hanya berdampak fisik, namun juga secara signifikan menggerus kesejahteraan mental dan sosial. Kerusakan ini berakibat pada pemunduran pembangunan manusia dan merugikan kualitas hidup masyarakat. Meskipun rasa cinta dan empati selalu ditekankan, namun tampaknya menjadi suatu tantangan untuk menjaga hubungan harmonis secara berkelanjutan. Jika kondisi ini terus berlanjut, risiko masyarakat rentan atau yang disebut sebagai "vulnerable society" di Indonesia dapat meningkat, di mana pemenang menjadi yang paling kuat dan yang kalah menderita atau menolak dengan keras sehingga memicu lebih banyak konflik.

Dalam menghadapi tantangan ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sebagai penyelenggara pemerintahan otonomi yang dipilih langsung oleh warga, pemerintah dituntut untuk menjadi mediator yang netral dan efektif dalam menangani konflik. Pemerintah perlu menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu yang muncul di tengah masyarakatnya, menyikapi, dan menyelesaikan konflik dengan prinsip kebenaran tanpa memihak pihak mana pun. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan iklim perdamaian yang memungkinkan kedua negeri untuk hidup berdampingan secara damai.

J. Latupeirissa, selaku ketua saniri Negeri Haria, menyatakan bahwa perdamaian adalah suatu harapan bagi kedua Negeri, di mana mereka menginginkan ketenangan hati yang dapat tumbuh perlahan dengan mengatasi konflik-konflik yang telah terjadi. Harapannya adalah menciptakan keharmonisan dalam kehidupan antara Negeri Porto dan Negeri Haria. Data yang diperoleh dari penelitian ini, bila dibandingkan dengan studi yang dilakukan oleh Rieuwpassa pada tahun 2015, menunjukkan bahwa penanganan konflik di kedua Negeri telah difasilitasi dengan baik oleh pemerintah Negeri. Meski demikian, pemerintah diharapkan segera menyelesaikan sengketa batas tanah yang telah lama menjadi isu, agar kepemilikan tanah oleh masing-masing Negeri dapat jelas dan meminimalisir konflik di masa depan.

Dalam operasi perdamaian, pemerintah dari kedua Negeri berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak yang bertikai duduk bersama dan menegosiasikan perjanjian demi mencapai kesepakatan perdamaian. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi upaya perdamaian mencakup kesulitan membangun rasa kepercayaan, adanya kepentingan lain di luar pemerintah, serta adanya provokasi dan faktor lainnya. Di sisi lain, faktor pendukung melibatkan kerja sama antara kedua Negeri dan sikap untuk tidak mencari masalah dengan saling mengakui hak wilayah masing-masing. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat sangat penting dalam menangani konflik ini dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Dari hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan bahwa konflik antara Negeri Porto dan Haria di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Kronologis konflik ini dimulai pada awal tahun 1924 dan melibatkan beberapa insiden signifikan. Konflik kedua terjadi pada Hari Minggu pagi tahun 1957, diikuti oleh konflik ketiga pada tahun 1977. Puncak konflik berskala besar terjadi di tahun 2001. Tempat konflik ini berpusat di dua Negeri tersebut yang terletak di pulau tersebut. Faktor penyebab konflik mencakup ketidakpedulian terhadap kesejahteraan bersama, yang mendorong perilaku egois dan prioritas pada kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya pada kesejahteraan bersama. Selain itu, ada perebutan sumber daya ekonomi dan sosial yang memicu persaingan agresif di antara individu atau kelompok masyarakat di kedua Negeri.

Konflik ini juga mengambil berbagai bentuk, seperti konflik antar pemuda baik secara internal maupun eksternal di berbagai tempat di Maluku, khususnya Saparua. Pelantikan raja Porto pada tahun 1983 menjadi titik fokus konflik akibat kesalahpahaman antar pemuda, yang menunjukkan bahwa konflik dapat muncul dari peristiwa-peristiwa kecil. Untuk meresolusi konflik di dalam masyarakat, Negeri Porto dan Haria mencoba berbagai pendekatan. Upaya membentuk tim perdamaian pada tahun 2012 dan 2013 tidak berhasil sepenuhnya, namun, pada tahun 2014, terbentuklah tim perdamaian yang terdiri dari pemerintah negeri, gereja, dan pendidikan, dikenal sebagai "tiga batu tungku." Tim ini mengadakan ibadah bersama setiap tanggal 27 setiap bulan sebagai langkah menuju perdamaian. Meskipun demikian, tantangan dan hambatan tetap ada, dan peran pemerintah serta partisipasi masyarakat lokal sangat penting dalam mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abdi, R. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori Dan Aplikasi)*.

- Ayyaash, K. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pada Internal Brownies Hacenda. *Performa*, 4(1), 01–10. <https://doi.org/10.37715/jp.v4i1.1181>
- Belitung, K. (n.d.). *Analisis Konflik Antara Masyarakat* .
- Dalam, S., Yowis, F., Karya, B., Skak, B., Simmel, P. G., Kritik, D. A. N., Dalam, S., Yowis, F., Karya, B. E. N., Dan, S., Nugros, F., & Georg, P. (n.d.). *Fungsi, konflik, dan kritik sosial dalam film yowis ben 2 karya bayu skak dan fajar nugros (perspektif georg simmel)*.
- Deny Sialana, Tutuarima, F., & Salamo, L. (2022). Peran Pemerintah dan Masyarakat Negeri Porto Hariadalam Menjaga Perdamaian. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9274–9279.
- Fatih, M. K. (2018). (*Studi Kasus Penutupan Pesantren Waria di Kotagede Yogyakarta*). 1, 66–76.
- Fisher, S. (2001). Katrampilan dan Strategi untuk Bertindak, cetakan pertama, Alih Bahasa S.N. Kratikasari,dkk. The Britsh, COUNCIL. *Mengelola Konflik*.
- Gunawan, W. (n.d.). Analisis Sososial. *Reneka Cipta*.
- Mutia S. R Aji, Leuwol, F. S., Salampessy, M. & Partini Dwi. (2023). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan Di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4542-4553.
- Moru, O. O. (2021). Israel dan Konflik sosial:Kajian sosio-historis tahapan 1 raja-raja 12:1-19. *Jurnal Teknologi Sistemika Dan Praktika*, 82.
- Mustamin, M. (2016). Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis Dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 185. <https://doi.org/10.58258/jime.v2i2.109>
- Nasikun. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*.
- Nova Syafira Ariyanti, N., Syafira Ariyanti, N., Mustiningsih, M., & Arifin, I. (2019). *The Principal's Conflict Management Strategy Through Increased Community Participation in the Era of Industrial Revolution 4.0*. 3(3), 1–18. <https://doi.org/10.2991/icet-19.2019.7>
- R, A. R. (2022). *Pandangan Hukum Islam terhadap Upaya Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia*. 5(2), 111–121.
- Robibns, S. (2015). Organizational Edition. New Jersey: Precentice Hall Ineternational Inc. *Behavior 9 Th Edition*.
- Soerjono, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Sumartono. (2019). Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 5(1), 1–17.